



# REVIU RENSTRA TAHUN 2021 s/d 2026



**KANTOR CAMAT BATU SOPANG**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Review Renstra Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun (2021– 2026), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat, Renstra ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Paser melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Semoga dengan tersusunnya Review Renstra Kecamatan Batu Sopang dapat meningkatkan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan mampu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Kabupaten Paser yaitu Menuju Kabupaten Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera).

**Batu Sopang, 17 Mei 2023**

**Camat Batu Sopang**



**Misran, SE,MM**

**NIP. 19720210 199303 1 006**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2 Sumber Daya .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan .....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	29
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
3.3 Telaahan Renstra .....	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	34
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Strategi Jangka Menengah .....	38
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK</b>	
5.1 Strategi .....	40
5.2 Kebijakan .....	40
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATU SOPANG YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	42
6.2 Indikator Kinerja .....	43
6.3 Kelompok Sasaran .....	43
6.4 Pendanaan Indikatif .....	44
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>57</b>



## DAFTAR TABEL

### Halaman

1. Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah .....	14
2. Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/Gol, Eselon dan Jenis Kelamin .....	14
3. Tabel 2.3 Anggaran .....	15
4. Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Batu Sopang .....	16
5. Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser .....	22
6. Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser 2016-2020 .....	25
7. Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan perangkat Daerah .....	31
8. Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	32
9. Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD .....	39
10. Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Kecamatan Batu Sopang berdasarkan RPJMD Kabupaten Paser .....	41
11. Tabel 6.1 Matrik Cascading Kinerja Kecamatan Batu Sopang .....	45
12. Tabel 7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .....	56



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

1. Skema keterkaitan antar dokumen lainnya ..... 6



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser adalah Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk OPD Kecamatan, Kecamatan Batu Sopang berkedudukan sebagai unsur pelaksana/penunjang urusan Pemerintahan di bidang Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Mempedomani pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap perangkat daerah wajib Menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Rencana strategis – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun untuk menentukan dan menetapkan arah kinerja perangkat secara berencana dan terorganisir serta bersinergi antar kegiatan – kegiatan dengan aktor pelaksana kegiatan sehingga arah rencana dapat mencapai sasaran yang maksimal sesuai dengan tujuan – tujuan yang akan dicapai.

Didasari oleh landasan normatif, yakni dengan diberlakukannya Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memaknai dari Undang – Undang ini sudah cukup memberi roh guna menjawab kebutuhan nyata yang diinginkan oleh daerah – daerah otonomi.

Era otonomi telah berjalan sesuai dengan kehendak Undang – Undang dan rakyat



Indonesia khususnya rakyat di daerah, dengan kesertaan segenap perangkat negara dan daerah hingga otonomi daerah dapat berjalan dengan wajar secara operasionalitas. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 serta Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

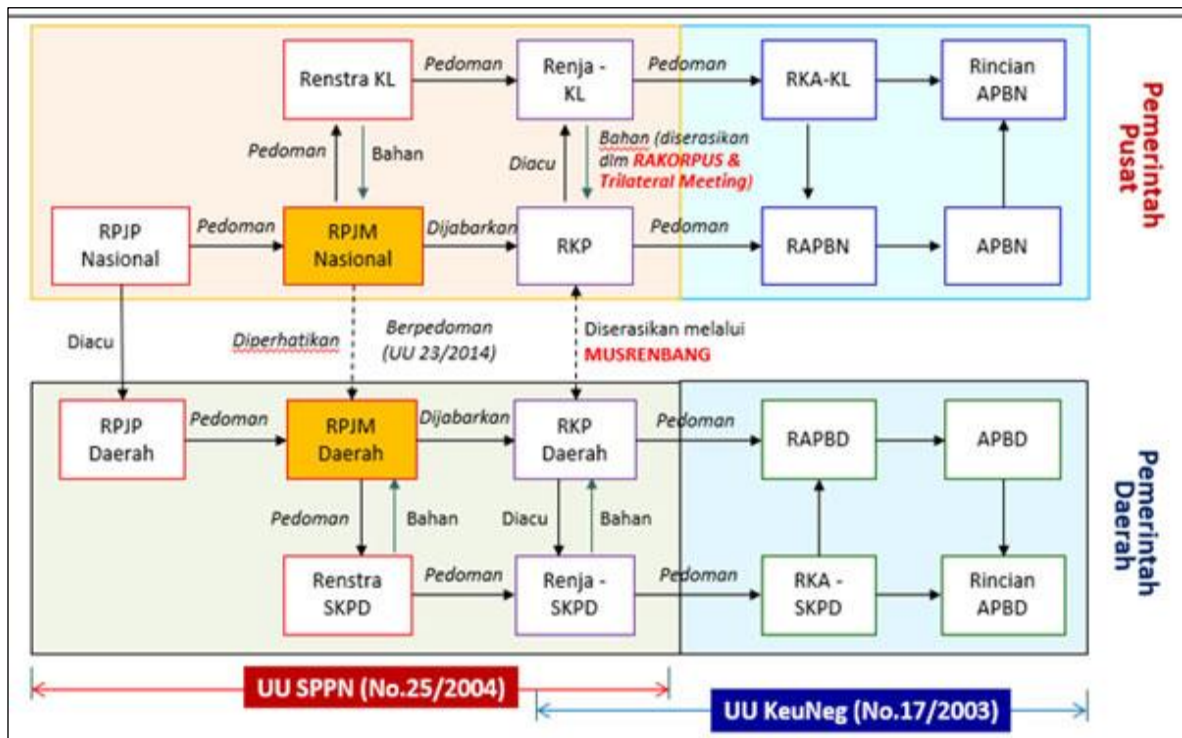
Renstra Kantor Kecamatan Batu Sopang tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Batu Sopang dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan masyarakat Desa.

Penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.



Gambar 1. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : UU SPPN, 2005

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RPJMD. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Rencana strategis pada Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, perlu dilakukan penyusunan RENSTRA Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021 – 2026 mengacu pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat





- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Paser Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Keputusan Camat Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  11. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026
  19. Peraturan Bupati Paser Nomor 54 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Review Renstra Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 2021 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan program, dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Batu Sopang

#### **2. Tujuan penyusunan Review Renstra adalah untuk**

Adapun tujuan penyusunan Review Renstra Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Memastikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu pelaksanaan selaras dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalibang Kabupaten Paser sebagaimana perubahan SOTK dan pelaksanaan tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Paser 2021 - 2026.
2. Menyelaraskan tolak ukur kinerja khususnya sub kegiatan dengan ketentuan yang mendasari adanya indikator kinerja subkegiatan dalam kurun waktu pelaksanaan 2023 – 2026 Renstra Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan ;

#### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Penyusunan Renstra Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021 – 2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**



- 2.1. Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan Batu Sopang
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Batu Sopang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Sopang



#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Batu Sopang

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Batu Sopang.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batu Sopang

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDNAG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BATU SOPANG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Batu Sopang

##### 2.1.1 Kedudukan

Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser adalah Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk OPD Kecamatan, Kecamatan Batu Sopang berkedudukan sebagai unsur pelaksana /penunjang urusan Pemerintahan dibidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

##### 2.1.2 Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.

Selain tugas diatas, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi



- d. Pembinaan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Kecamatan di wilayah Kabupaten Paser sudah seharusnya mempunyai urusan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Struktur organisasi Kecamatan Batu Sopang berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kecamatan.

#### **2.1.2.1. Camat**

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

#### **2.1.2.2. Sekretariat**

- a. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur Kecamatan;
- b. Untuk melenggarakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan rencana program dan indikator kinerja untuk setiap kegiatan;
  - b. Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Kecamatan;
  - c. Pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan
  - d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh Subbag Bagian Program dan Keuangan dan Subbag Kepegawaian dan Umum.

#### **Sekretaris membawahi :**

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;





Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja subbagian kepegawain dan umum ;
- b. Pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan ;
- c. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, pengamanan dan inventarisasi barang milik daerah ;
- d. Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan ;
- e. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi kepegawaian ;
- f. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi

**2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas:

Melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan perencanaan kegiatan Kecamatan
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang perumusan perencanaan Kecamatan
- d. Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan
- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Kecamatan
- f. Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran
- g. Mengelola anggaran Kecamatan
- h. Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**2.1.2.3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan**

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, kependudukan dan pertanahan. Dan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi Pemerintahan dan Kependudukan
2. Penyiapan bahan usulan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan
3. Penyiapan bahan untuk usulan pendelegasian pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan



4. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan pemekaran penggabungan dan penghapusan kelurahan
5. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan perangkat Kecamatan dan Kelurahan
6. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan profil Kelurahan
7. Pelaksanaan pengusulan pengangkatan Lurah dan Perangkat Kelurahan
8. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang perijinan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati
9. Pengorganisasian pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pemilu/pilkada
10. Pelaksanaan penyusunan laporan pengevaluasian pelaksanaan program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan
11. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi seksi pemerintahan dan kependudukan.

#### **2.1.2.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan yang meliputi pembinaan perlindungan masyarakat pos kamling dan pengamanan swakarsa masyarakat
2. Pelaksanaan polisi pamongpraja dan PNS
3. Pelaksanaan penegakan PERDA/Peraturan Bupati
4. Pengorganisasian perencanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
5. Pengkoordinasian penataan dan pembinaan kelintasan
6. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta kelinmasan
7. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi ketentraman dan ketertiban umum.



#### **2.1.2.5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pendapatan dan asset Desa, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya dan pelaksanaan gerakan PKK
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan usaha ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan penyerahan dan fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan oleh Bupati kepada Pemerintah Desa
- f. Pelaksanaan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa
- h. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan aparat/perangkat pemerintah Desa dan anggota BPD
- i. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengolahan dan profil Desa
- j. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan asset Desa
- k. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat
- l. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### 2.1.2.6. Seksi Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

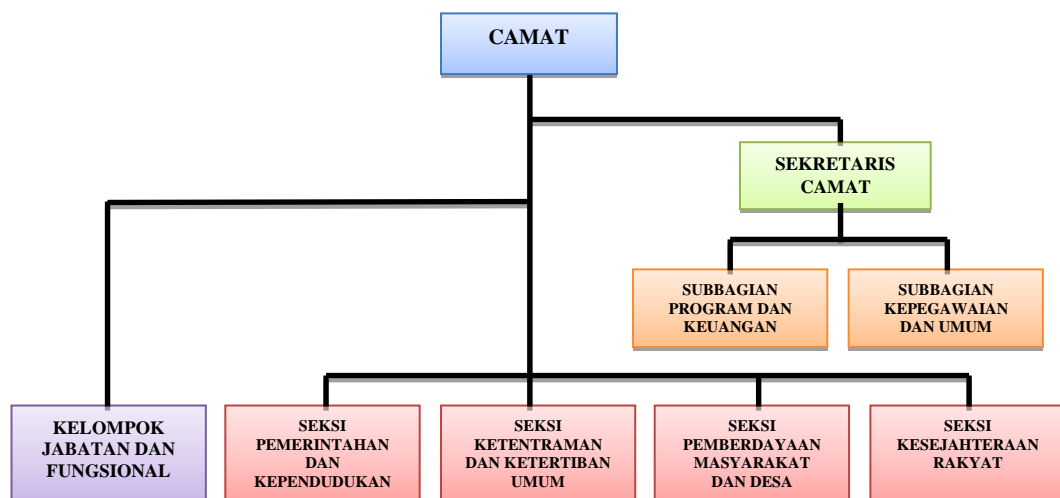
Mempunyai tugas melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi kesejahteraan rakyat
- b. Pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan dan urusan kesejahteraan rakyat
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat
- d. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi seksi Kesejahteraan Rakyat

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan sebagai bagan berikut ini :

**Gambar 4. Struktur Organisasi Kecamatan Batu Sopang**





## 2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Batu Sopang

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan ke dalam analisis jabatan sebagai dasar penghitungan sumber daya manusia aparatur yang dimiliki pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kecamatan Batu Sopang, Jumlah pegawai adalah 49 orang terdiri dari 8 Pajabat Struktural, 7 Orang staf PNS, 34 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah**

No	Status Pegawai	Jumlah	Rasio
1	Pegawai Negeri Sipil	15	30,61%
2	PTT Kecamatan	34	69,39%
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/Gol, Eselon dan Jenis Kelamin**

No	Pangkat/Gol	Jabatan	Eselon	Jenis Kelamin	Jumlah
	KECAMATAN				
1	Pembina Tk. I/ IV B	Camat	Eselon III a	L	1
2	Penata Tk. I/ III D	Sekretaris Camat	Eselon III b	L	1
3	Penata Tk.I / III D	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Eselon IV a	L	1
4	Penata Tk. I / III D	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Eselon IV a	L	1
5	Penata Tk. I / III D	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Eselon II a	P	0
6	Penata Tk. I / III D	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Eselon IV a	L	1
7	Penata / III C	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV b	L	1
8	Penata Tk. I / III D	Kasubag Program dan Keuangan	Eselon IV b	L	1
9	Penata / III C	Staf	Non Eselon	P	1
10	Penata Muda TK.I/III B	Staf	Non Eselon	L/P	1
11	Pengatur TK I/II D	Staf	Non Eselon	L/P	1
12	Pengatur/II C	Staf	Non Eselon	L/P	1
13	Penata Muda/III A	Staf	Non Eselon	L/P	2
14	Penata Tk.I/III D	Staf	Non Eselon	L	1



15	Pengatur Muda Tk I / II B	Staf	Non Eselon	L	1
16	Juru TK I	Staf	Non Eselon	L	0
17	Jumlah ASN				15
	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Kecamatan				34
	Total				49

Sumber : Sekretariat Kecamatan Batu Sopang Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Kecamatan Batu Sopang	49
	<b>Jumlah</b>	49

Sumber : Sekretariat Kecamatan Batu Sopang Tahun 2023

Dengan melihat komposisi pegawai Kecamatan Batu Sopang, maka dapat disimpulkan jumlah personil ASN sekitar 30,61% sedangkan persentase Pegawai Tidak Tetap sebesar 69,39%.

Karenanya, agar pembinaan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas Pembina yang diinginkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan uraian tugas masing-masing
2. Adanya tindak lanjut analisis jabatan
3. Disiplin pegawai semakin mantap
4. Pembinaan dan bimbingan teknis dilaksanakan secara intensif berkesinambungan dan tepat sasaran
5. Timbul dorongan/motivasi pada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

### 2.2.2 Anggaran

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1.	2017	4.741.715.732,00	5.571.136.822,19	85,11
2.	2018	4.576.936.264,00	5.009.387.670,00	91,36
3.	2019	4.313.615.414,00	5.179.649.075,00	83,28
4.	2020	5.181.529.770,00	4.559.870.650,00	88
5.	2021	4.690.168.881,00	4.469.641.633,00	83
	<b>JUMLAH</b>			



**Tabel 2.3 Anggaran**

**2.2.3. Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau asset yang dimiliki dan /atau dikusai oleh Camat selaku kuasa pengguna Barang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai di kantor Kecamatan Batu Sopang seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Batu Sopang**

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah	1	B
2	Dump Truck	1	B
3	electric generating set lainnya (dst)	1	R
4	Internet	1	B
5	P.C Unit	10	B. R
6	Lap Top	15	B
8	Hardisk	8	B
9	Monitor	10	B
10	Printer	15	B, RB
12	Router	1	B
14	Triton	1	RB
15	Sepeda Motor	4	RB
18	Global Positioning System	2	B, RB
22	Lemari Kayu	5	B, RB
24	Filing Cabinet Besi	4	B
25	Brandkas	1	RB
29	Papan Absen	1	B
30	Meja Kerja Kayu	50	B, R
31	Kursi Besi/Metal	325	B
32	Meja Rapat	1	B
33	Meja Panjang	5	B
38	Kursi Plastik	250	B
39	Sofa	3	B
42	A.C. Split	13	B
43	Kipas Angin	4	B
44	Exhause Fan	2	B
45	Televisi	3	B
46	Amplifier	1	B





47	Sound System	6	B
48	Unit Power Supply	1	B
49	Tiang Bendera	1	B
50	Tangga Aluminium	1	B
53	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	B
54	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	B
55	Meja Tamu Biasa	2	B
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	B
58	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	B
61	Handy Talky (HT)	6	B

Dari tabel di atas menunjukkan aset atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Batu Sopang rata-rata dalam kondisi baik. Ada beberapa aset yang rusak berat dan belum dilaksanakan penghapusan. Terutama Kendaraan roda empat yang sudah bertahun-tahun belum dihapus padahal pihak kecamatan sudah mengusulkan penghapusan dan pengembalian aset kepada pihak BKAD bagian Aset.

Adapun rincian data aset tetap berdasarkan hasil rekonsiliasi Laporan Keuangan per Desember 2020, Kecamatan Batu Sopang memiliki aset sebesar :

1. Tanah	Rp. 542.810.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 3.926.136.754,37
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 5.933.481.835,39
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 5.173.600.546,63
5. Aset Tetap lainnya	Rp. 2.218.000,00
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 32.087.000,00

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Batu Sopang pada tahun Anggaran 2021 dialokasikan dana dari APBD Kabupaten Paser sebesar Rp. 4.690.168.881,00 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) termasuk didalamnya gaji dan tunjangan PNS.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Sopang

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan mengacu pada Kepmenpan No. 007 Tahun 2007, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat



pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelayanan Administrasi Terpadu “PATEN” merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan diseluruh Indonesia berdasarkan Instruksi Permendagri RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan *PATEN* adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. MOTTO dalam pelayanan adalah “ *Pelayanan adalah ibadah* ).

### 2.3.1 Kinerja Pelayanan Bidang Perizinan

## 3 Kinerja Pelayanan Non Perizinan

### a. Bidang Kependudukan

Sebagai dampak dari semakin berkembangnya dan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk, sehingga berdampak pula pada frekuensi pelayanan di bidang kependudukan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti penertiban pengantar KTP, KK, Keterangan domisili, Surat keterangan tidak mampu, Surat Dispensasi Nikah dan lain sebagainya. Sehingga memerlukan pelayanan yang baik dan kemudahan dan keterbukaan prosedur seperti :

1. Memberikan sosialisasi peraturan kependudukan pada Desa
2. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

No	Uraian Pelayanan	Jumlah Permohonan / Penerbitan
1	Penerbitan Surat Pengantar KK	200
2	Penerbitan Surat Pengantar KTP	150
3	Penerbitan Surat Pindah	175
4	Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris	15



5	Penerbitan Surat Dispensasi Nikah	45
6	Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu	125
	<b>Jumlah</b>	<b>710</b>

#### b. Bidang Pertanahan

Dalam bidang pertanahan, peranan Camat berkaitan dengan peralihan hak, Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena “beralih” atau “dialihkan”. Adapun dialihkan, misalnya keran jual beli, tukar menukar, hibah ataupun pernyataan modal berupa sebidang tanah dalam suatu perusahaan. Syarat utama untuk mendaftarkan peralihan hak alias balik nama ini adalah akta yang dibuat oleh PPAT, sedangkan untuk waris cukup dengan Surat Keterangan Waris yang diperkuat oleh Kepala Desa setempat. Untuk menerbitkan akta, yang perlu dipersiapkan adalah sertifikat ataupun surat keterangan dari Camat atau Lurah mengenai kebenaran kepemilikan atas tanah oleh penjual. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Aturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, jabatan PPAT tidak boleh rangkap oleh Pegawai Negeri atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

#### Laporan Pengurusan Tanah di Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021

No	Uraian Pelayanan	Jumlah Permohonan / Penerbitan
1	Penerbitan Surat Keterangan Tanah	75
2	Surat Keterangan Ahli Waris	15
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>

#### Kinerja Pelayanan dalam Percepatan Pembangunan

##### a. Pendampingan pengelolaan keuangan Desa

Pendampingan pengelolaan keuangan Desa diharapkan dapat membantu Kepala Desa, dan perangkat Desa dapat mengelola keuangan Desa dengan baik dan benar berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dimulai dari penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pelaksanaan APBDesa, laporan pertanggungjawabannya, evaluasi dan monitoring serta kelengkapan dan keabsahan dokumen. Adapun kegiatan Kecamatan terkait pendampingan pengelolaan keuangan Desa antara lain : Koordinasi dan monitoring evaluasi ADD, Koordinasi dan verifikasi pengelolaan keuangan Desa dan Fasilitasi Kegiatan Sistem



Keuangan Desa (Siskeudes).

**b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Demikian pula Musrenbang tingkat Kelurahan, merupakan forum musyawarah yang membahas program/kegiatan yang akan di usulkan di tingkat Kecamatan yang kemudian tentunya akan menjadi usulan di Kabupaten

**c. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, agar perencanaan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi target, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

**Kinerja Pelayanan dalam Koordinasi dengan Dinas Tekhnis**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa umumnya merupakan kegiatan lintas sektoral baik berupa kordinasi maupun fasilitasi dengan Dinas/Instansi lain. Adapun koordinasi dan fasilitasi meliputi urusan kesehatan, kesejahteraan sosial, perumahan dan pertanahan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan kegiatan pemerintahan umum lainnya. Reviuw Kinerja Kantor Kecamatan Batu Sopang secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.3.1 dan tabel 2.3.2 berikut.



Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat				Baik	Baik	Baik	Baik		-	-	Baik	Baik		0%	0%	100%	100%	
2	Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat terselesaikan tepat waktu				90%	90%	90%	90%		90%	100%	100%	80%		100%	111%	111%	89%	
3	Persentase pelayanan adm.perijinan yang dapat terselesaikan tepat waktu				90%	90%	90%	90%		90%	98%	100%	100%		100%	109%	111%	111%	
4	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur				90%	90%	90%	90%		100%	100%	90%	100%		111%	111%	100%	111%	
5	Persentase Capaian Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				90%	90%	90%	90%		100%	100%	100%	100%		111%	111%	111%	111%	
6	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan				90%	90%	90%	90%		85%	90%	89,50%	75,93%		94,40%	99%	99%	84%	
7	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				90%	90%	90%	90%		100%	100%	100%	100%		111%	111%	111%	111%	



8	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum				90%	90%	90%	90%		90%	100%	100%	50%		100%	111%	111%	56%	
9	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum				90%	90%	90%	90%		90%	100%	100%	100%		100%	111%	111%	111%	
10	Menurunnya rumah tangga miskin				25%	20%	15%	5%		20,24%	17,83%	16,60%	3,52%		80,96%	89,15%	110,60%	70,40%	
11	Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes				90%	90%	90%	90%		100%	90%	100%	100%		111%	100%	111%	111%	
12	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir				15%	15%	15%	30%		10%	15%	16,70%	25%		66,70%	100%	111%	83%	

Dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Batu Sopang selama 4 tahun terakhir hampir seluruh indikator menunjukkan capaian yang baik. Pada tahun 2017 dan 2018 indikator kinerja “Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)” menunjukkan tidak adanya capaian kinerja dikarenakan pada tahun tersebut proses pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan Kotak Pengaduan Masyarakat, dimana tidak ada satu masyarakatpun yang mengisi kotak Pengaduan tersebut sehingga data SKM tidak dapat dikumpulkan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Adapun pada Tahun 2020 nilai persepsi Interval SKM Nilai Persepsi, Interval SKM, Mutu Pelayanan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



Nilai Persepsi	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja pelayanan Pemerintah Kantor Kecamatan Batu Sopang pada tahun 2020 melalui Survey Kepuasan Masyarakat adalah **80,36** atau **3,215** berada pada range interval antara 2,51– 3,25 sehingga dikategorikan “BAIK”.

Permasalahan :

1. Masyarakat masih banyak yang tidak mau melakukan Survei karena membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengisi kuisioner.
2. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.

Solusi :

1. Perlunya pengadaan sistem informasi yang menarik berbasis komputer yang memudahkan masyarakat untuk melakukan Survei ini.
2. Menyediakan anggaran Survei Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2020 realisasi indikator “Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum” menunjukkan capaian kinerja di angka 50 % dengan capaian kinerja 56% dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena situasi Pandemi COVID-19.

Pada indikator Kinerja “menurunnya rumah tangga miskin” terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan perhitungan jumlah Keluarga miskin yang awalnya memakai data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima bantuan Beras Sejahtera menjadi menggunakan data Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2020 angka kemiskinan di Kecamatan Batu Sopang dihitung berdasarkan data Keluarga Miskin penerima Bantuan PKH yaitu 75 Kepala Keluarga di bagi dengan Jumlah total Kepala Keluarga di Kecamatan Batu Sopang yaitu 2.312 KK menghasilkan nilai 3,52 %





**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser 2016-2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1).Jumlah surat pengantar pembuatan KTP	56.090.000	63.000.000	93.980.000	71.600.000		46.296.000	63.000.000	93.980.000	71.600.000		82,53	100	100	100		6%	12%
2).Jumlah surat pengantar KK																	
1).Jumlah pelayanan sertifikat IMB																	
Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Baik	-	-	16.591.875	5.991.500		-	-	16.591.875	5.991.500		-	-	100	100			
Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah berjalan baik																	
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	88.200.000	90.000.000	114.970.200	60.000.000		88.200.000	70.861.874	96.771.961	57.046.520		100	78,73	84,17	95,07		-9%	-10%
Jumlah Kendaraan Dinas operasional layak Jalan	52.500.000	26.000.000	8.200.000	90.850.000		26.000.000	3.377.000	8.200.000	90.850.000		49,52	12,98	100	100		15%	37%
Jumlah bulan penyediaan tenaga administrasi keuangan	81.836.000	101.906.000	144.308.000	138.375.250		76.916.000	101.904.250	144.303.371	138.342.000		93,98	99,99	99,99	99,99		14%	16%
Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	24.966.451	25.000.000	25.000.000	18.189.800		20.081.451	25.000.000	25.000.000	18.185.800		80,43	100	100	99,99		-8%	-2%
Jenis barang cetakan	8.362.000	8.232.000	8.082.000	8.788.000		7.862.000	8.232.000	8.081.900	8.788.000		94,02	100	99,99	100		1%	3%
Jenis penggandaan	-																
Jenis komponen listrik dan penerangan bangunan	798.000	2.300.000	1.965.000	1.550.000		798.000	2.300.000	1.965.000	1.550.000		100	100	100	100		18%	18%
Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	8.250.000	10.950.000	2.200.000	-		8.250.000	10.950.000	2.200.000	-		100	100	100	-		-	-
Gedung kantor yang terpelihara	-	40.000.000	-	-		-	40.000.000	-	-		-	100	-	-		-	-
Jumlah bahan bacaan	-	-	4.080.000	510.000		-	-	4.080.000	510.000		-	-	100	100		-	-
Jumlah makanan dan minuman	9.450.000	9.360.000	28.640.000	5.400.000		7.200.000	9.360.000	28.640.000	5.400.000		76,19	100	100	100		-13%	-7%
Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi	80.201.300	72.000.000	99.555.000	57.697.980		70.310.000	70.275.000	99.435.000	57.650.000		87,66	97,6	99,99	99,92		-8%	-5%
Jumlah Pegawai Non PNS penyedia Jasa Kebersihan Kantor	100.393.000	104.407.000	73.370.500	73.750.500		74.977.000	102.007.000	73.370.500	73.750.000		74,68	97,7	100	100		-7%	0%
Jenis bahan dan peralatan kebersihan																	
Jumlah jenis perlatan rumah tangga																	
Jumlah instalasi listrik / AC / air / telpon	28.000.000	-	-	-		18.000.000	-	-	-		64,28	-	-	-		-	-



**KECAMATAN  
BATU SOPANG**

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan																
Jumlah perlengkapan rumah jabatan																
Jumlah perlengkapan gedung kantor	23.700.000	30.300.000	25.500.000	-		23.700.000	25.103.142	22.700.000	-		100	82,84	89,01	-		- -
Jumlah peralatan gedung kantor	4.000.000	166.750.000	6.890.000	4.940.000		4.000.000	166.750.000	6.890.000	4.940.000		100	100	100	100		5% 5%
Jumlah Peralatan/perengkapan Kantor	-	-	-	116.401.240		-	-	-	116.401.240		-	-	-	100		- -
Jumlah meubelair																
Jumlah rumah jabatan yang dipelihara																
Jumlah rumah Dinas staf yang dipelihara																
Jumlah gedung kantor yang dipelihara	42.000.000	70.000.000	45.860.000	45.000.000		22.000.000	70.000.000	45.614.386	45.000.000		52,38	100	99,99	100		2% 20%
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara																
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	12.500.000	16.950.000	15.000.000	13.000.000		7.500.000	8.601.150	11.734.800	5.509.810		60	50,74	78,23	42,38		1% -7%
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara																
Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan Terlaksana dengan baik	-	-	63.150.000	58.950.000		-	-	63.150.000	58.950.000		-	-	100	100		- -
1)Jumlah pakaian dinas (PDH)	-	-	-													
2)Jumlah pakaian kerja Lapangan Petugas Persampahan (PKL)																
1)Jumlah pilar batas desa	-	56.325.000	6.350.000	6.019.000		-	56.275.000	6.350.000	6.019.000		-	99,99	100	100		- -
1). Berita Acara penamaan rupa rupa bumi	4.995.000	11.460.000	-	1.800.000		4.995.000	11.460.000	-	1.800.000		100	100	-	100		- -
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi di Tingkat Kecamatan																
Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan	59.350.000	66.650.000	53.275.000	2.500.000		48.600.000	66.647.500	53.275.000	2.500.000		81,88	99,99	100	100		-55% -52%
Jumlah Pokja PKK aktif	13.712.500	30.462.500	9.287.500	9.261.500		13.712.500	30.462.000	9.287.500	9.261.500		100	100	100	100		-9% -9%
Terwujudnya Anak-anak yang Cerdas	-	10.140.000	2.500.000	2.850.000		-	10.140.000	2.500.000	2.850.000		-	100	100	100		- -
Jumlah Posyandu aktif	-	7.600.000	-	7.100.000		-	7.600.000	-	7.100.000		-	100	-	100		- -
2)Jumlah Posyantek dibina	-															
1)Jumlah Kegiatan TTG yang diikuti	21.950.000	17.690.000	7.980.000	7.300.000		21.950.000	17.650.000	7.980.000	7.300.000		100	99,99	100	100		-24% -24%
Jumlah bulan penyediaan tenaga pengendali keamanan dan ketertiban	272.910.000	305.430.000	336.035.000	269.690.000		209.888.000	295.550.000	336.035.000	268.280.000		76,9	96,76	100	99,99		0% 6%
Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi FKDM	-	-	20.000.000	9.389.000		-	-	20.000.000	5.639.000		-	-	100	60,05		- -
Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kebakaran	180.060.000	204.120.000	185.960.000	160.960.000		118.868.000	198.191.500	172.660.000	160.960.000		60,6	97,09	92,84	100		-3% 8%
Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba																



KECAMATAN  
BATU SOPANG

Jumlah razia penertiban	-	-	-	9.600.000	-	-	-	9.600.000	-	-	-	100	-	-
Jumlah taman yang dipelihara	67.110.000	112.250.000	229.600.000	-	53.728.000	112.250.000	208.600.000	-	80,05	100	90,85	-	-	-
Jumlah bulan penyediaan tenaga pengelola persampahan	145.100.000	166.100.000	-	677.400.000	136.600.000	157.100.000	-	631.433.200	94,14	94,58	-	93,21	-	-
Jumlah pasar desa aktif	9.900.000	-	-	-	9.900.000	-	-	-	100	-	-	-	-	-
1). Jumlah Rumah Tangga penerima bantuan	-	-	5.060.000	-	-	-	5.060.000	-	-	-	100	-	-	-
Jumlah RTS yang menerima Beras Sejahtera	127.854.000	140.401.600	-	-	114.707.000	139.290.400	-	-	89,71	98,99	-	-	-	-
1).Jumlah Peserta TC LPTQ	26.730.000	53.390.000	-	-	26.730.000	50.390.000	-	-	100	94,38	-	-	-	-
2). Jumlah kegiatan safari ramadhan	41.575.000	46.200.000	92.500.000	-	19.600.000	46.200.000	92.500.000	-	47,14	100	100	-	-	-
3). Jumlah kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten yang terlaksana														
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Puskesmas	5.390.000	-	-	-	5.930.000	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Kesehatan di lingkungan Sekolah	6.300.000	10.540.000	12.360.000	-	6.300.000	10.540.000	12.360.000	-	100	100	100	-	-	-
Jumlah Desa yang dikunjungi dalam kegiatan Safari Ramadhan dan Safari Syawal	-	-	-	19.200.000	-	-	-	19.200.000	-	-	-	100	-	-
1). Jumlah desa mengikuti lomba desa	13.200.000	17.200.000	6.650.000	9.550.000	13.200.000	17.150.000	6.650.000	9.550.000	100	99,99	100	100	-8%	-8%
Jumlah desa yang ADDnya terevaluasi sesuai ketentuan	31.295.000	30.880.000	63.710.000	49.118.000	24.633.000	30.880.000	63.710.000	49.118.000	78,71	100	100	100	12%	19%
Jumlah Desa yang dilakukan verifikasi	8.400.000	15.600.000	5.940.000	7.500.000	8.400.000	15.300.000	5.940.000	7.500.000	100	99,99	100	100	-3%	-3%
Jumlah dokumen Renstra yang disusun dan ditetapkan														
Jumlah dokumen Renja yang disusun dan ditetapkan	2.470.000	2.430.000	1.548.000	5.000.000	2.130.000	2.430.000	1.498.000	4.985.000	96	100	98	95	18%	24%
1).Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	17.575.000	20.440.000	25.460.000	27.000.000	14.510.000	20.390.000	25.460.000	27.000.000	82,56	98	100	100	11%	17%
1).Jumlah Dokumen Review dan Revisi Renstra SKPD	7.090.000	-	-	-	5.600.000	-	-	-	78,89	-	-	-	-	-
Jumlah dokumen evaluasi Renja	2.470.000	5.181.000	5.636.000	5.000.000	2.130.000	5.181.000	5.636.000	5.000.000	90	100	100	100	19%	24%
Jumlah dokumen LKJIP yang disusun	2.380.000	1.000.000	3.100.000	2.000.000	2.380.000	1.000.000	3.100.000	1.973.000	100	100	100	90	-4%	-5%
Terciptanya Sistem Pengendalian dalam Pemerintah	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	100	-	-	-	-	-
1).Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya														
2).Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi														
1). Tersedianya Website SKPD														
1). Profil desa/kelurahan	3.200.000	-	2.380.000	1.588.000	3.200.000	-	2.380.000	1.588.000	100	-	100	100	-	-
Pembangunan Jalan dan Jembatan di Pedesaan	215.054.000	-	-	-	215.054.000	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Meningkatnya Sarana dan Prasarana (Pembangunan Gedung Sekolah)	204.028.001,19	-	-	-	204.028.001,19	-	-	-	100	-	-	-	-	-



KECAMATAN  
BATU SOPANG

Terciptanya Sistem Belajar Mengajar ( Mebeluer Sekolah)	205.000.000	-	-	-	205.000.000	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Jumlah Jasa Konsultan Perencanaan Infrastruktur Yang Dibayar														
Jumlah Jasa Konsultan Perencanaan Sarana Penunjang Pendidikan Yang Dibayar														
Jumlah Jasa Konsultan Perencanaan Jalan yang Dibayar														
<b>JUMLAH</b>	<b>2.309.490.252</b>	<b>2.163.955.100</b>	<b>1.806.814.075</b>	<b>2.133.079.770</b>	<b>1.991.056.952</b>	<b>2.102.462.316</b>	<b>1.747.326.945</b>	<b>2.071.135.956</b>						<b>-2%</b> <b>1%</b>

Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan terdapat 81 indikator kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Kecamatan Batu Sopang. Jumlah Anggaran yang dialokasikan kepada Kantor Kecamatan Batu Sopang dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut : Anggaran tahun 2017 sebesar Rp 2.309.490.252,00 turun menjadi Rp 2.163.955.100,00 pada tahun 2018, kemudian terjadi penurunan Kembali menjadi Rp 1.809.814.075,00 di tahun 2019. Pada tahun 2020 anggaran naik menjadi Rp 2.133.079.770,00. Dilihat dari komposisi belanja daerah yang dialokasikan ke Kantor Kecamatan Batu Sopang, Belanja Langsung rata-rata sebesar 1,58% dengan kecenderungan menurun.



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Sopang

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan sebuah organisasi. Hal ini disebabkan landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kecamatan, maka Kecamatan mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas kinerja antara lain :

### 1. Peluang :

- Pada aspek pengembangan SDM pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Penajam Paser Utara menjadi peluang dari bermigrasinya SDM yang berkualitas , ini akan memunculkan pionir - pionir pengembangan ekonomi maupun social yang baru
- Kepedulian pihak swasta dan keterlibatan dalam pembangunan terutama di desa- desa memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Keberadaan tambang batu bara di wilayah Kecamatan Batu Sopang yang menjadi tujuan pencari kerja, memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
- Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang bagi Aparatur Kantor Kecamatan Batu Sopang untuk meningkatkan kualitas sumber Daya Aparatur dalam melakukan pelayanan publik.
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi pembangunan
- Adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lintas sektoral yang memberikan kesempatan masyarakat seluas-luasnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya
- Sektor perkebunan sawit yang menjadi peluang usaha dan peluang pencari kerja.
- Pertumbuhan penduduk tinggi

### 2. Tantangan :

- Krisis Pandemi Covid-19 yang melanda, memunculkan ancaman bagi beberapa sektor usaha, menyebabkan naiknya angka pengangguran di Kecamatan Batu Sopang.
- Keberadaan sektor pertambangan batu bara yang menjadi tujuan pencari kerja, mengakibatkan mobilitas penduduk yang tinggi



- Maraknya pembukaan lahan perkebunan yang mengakibatkan tingkat bencana kebakaran lahan semakin tinggi.
- Adanya peluang penerapan Good Governance masih terkendala dengan pembiayaan dan kurangnya sumberdaya aparatur yang siap untuk penerapan berbagai kebijakan yang mendukung penerapan Good Governance
- Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan internet yang masih belum terjangkau ke beberapa Desa di wilayah Kecamatan Batu Sopang.
- Aparatur Kecamatan dan Desa yang terbatas secara kuantitas dan kualitas sehingga kurang optimalnya kinerja perangkat Daerah

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Batu Sopang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptibilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan membandingkan antara Target Kinerja RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Batu Sopang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata Kelola Pemerintahan Kecamatan/Desa
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Belum optimalnya pengawasan terhadap Perda dan Perkada

**Table 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Masih Rendah	Kualitas Pengawasan Internal Masih Rendah
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal
			Manajemen SDM belum optimal
		Rendahnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan	Masih rendahnya pelaksanaan standarisasi pelayanan publik di Kecamatan
		Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan umum	
		Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum optimal.	
	Pengelolaan Potensi Rawan Konflik dan Trantibum Belum Optimal	Penegakan Perda Belum Optimal	
2	Tingkat kemandirian desa masih rendah	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan masih belum optimal	Sinkronisasi antar pemangku kepentingan terkait kegiatan pembangunan yang dilaksanakan belum optimal



		Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa / kelurahan
		Belum optimalnya peran dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kecamatan Batu Sopang memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati No 46 Tahun 2016 yang jika dikaitkan dengan Visi – Misi Bupati dan wakil Bupati lima tahun ke depan terkait dengan :

1. Misi 2 yaitu Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang professional, partisipatif dan transparan.
2. Misi 4 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera					
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
1	Misi II Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang professional, partisipatif dan transparan	<p>Penyelenggaraan perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.</p> <p>Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Belum optimalnya tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Belum optimalnya kinerja pelayanan di Kecamatan</p> <p>Belum optimalnya pengawsan terhadap Perda dan Perkada</p>	<p>Tugas dan Fungsi yang sudah jelas</p> <p>Dukungan pembiayaan dan komitmen Pemerintah Daerah</p>	Keterbatasan sarana prasarana prosedur dan SDM.





2	Misi : IV Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Dukungan pembiayaan dan Komitmen dari Daerah	Krisis Pandemi Covid 19 yang membatasi ruang gerak aktivitas masyarakat yang mengakibatkan melemahnya ekonomi secara mikro .
---	--	--	---	--	--

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan karena Renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD kabupaten Paser 2021-2026

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (Geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa



prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program memberikan kajian kedepan adalah :

1. Kecamatan Batu Sopang yang berfungsi sebagai pusat pengembangan PPK dalam system perwilayahan, wilayah pengembangan system perkotaan.
2. Sistem Jaringan prasarana wilayah meliputi rencana pengembangan system jaringan sumberdaya air berupa jaringan air bersih.
3. Meningkatkan jaringan jalan antar Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Paser serta Akses jalan antar Kecamatan dan Desa
4. Meningkatkan akses jaringan energy seperti fasilitas pembangkit listrik dan tata kelola pelayanan kelistrikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
5. Meningkatkan jaringan komunikasi nirkabel untuk mendorong komunikasi, konektivitas dan hubungan antar wilayah dan wilayah perdesaan yang lebih intens
6. Meningkatkan akses dan kualitas sarana air bersih
7. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat untuk mencegah kepadatan penduduk dengan mengedepankan kualitas sanitasi, ramah lingkungan dan jauh dari resiko bencana serta mempertimbangkan kualitas ruang dengan memperluas ruang hijau dan ruang terbuka.
8. Kecamatan Batu Sopang sebagai Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
9. Kecamatan Batu Sopang sebagai Kawasan rawan bencana longsor
10. Kecamatan Batu Sopang sebagai Kawasan budidaya hutan rakyat dan merupakan Kawasan pertanian.

Berdasarkan fokus pembangunan Kabupaten Paser dalam rentang 5 (lima) tahun tersebut, maka focus pembangunan Kecamatan Batu Sopang menitik beratkan pada penataan daerah otonomi khususnya di wilayah perbatasan antar Desa, penguatan pelayanan publik



yang merujuk pada pelayanan Paten, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan Desa dan Kelurahan, Pemerintahan Umum, peningkatan kualitas penegakan Perda dan Perkada untuk Terwujudnya Kecamatan Batu Sopang sebagai Kecamatan yang Proaktif dalam Pelayanan dan Pembangunan.

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Batu Sopang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptibilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggung jawabkan

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Oppurtunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

#### > Analisis Lingkungan Internal dan Analisis lingkungan Eksternal.

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat Analisis lingkungan internal dan Analisis lingkungan External. Untuk itu perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai yang berguna untuk mengetahui factor kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi elemen external organisasi yang sifatnya yang relative kurang dikuasai yang berguna untuk mengetahui factor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas

#### ANALISIS SWOT

<b>KEKUATAN ( Strengths )</b>	<b>KELEMAHAN ( Weaknesses )</b>
-------------------------------	---------------------------------



<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; PERDA Nomor 23 Th.2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.</li> <li>&gt; Perda No 012 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Terbatasnya jumlah aparat/Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Batu Sopang,</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tersedianya sarana dan prasarana operasional pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang memadai dalam pelaksanaan kelancaran tugas-tugas Kecamatan.</li> <li>&gt; Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur Kecamatan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Telah ditetapkan RPJPD dan RPJMD Kab. Paser Tahun 2021-2026.</li> <li>&gt; Berkembangnya pusat-pusat perdagangan</li> <li>&gt; Berkembangnya tempat daerah hunian pemukiman penduduk</li> <li>&gt; Daya beli masyarakat meningkat.</li> <li>&gt; Adanya dukungan/komitmen Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Beragam tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang- kadang pertentangan sehingga aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.</li> <li>&gt; Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak masyarakat.</li> <li>&gt; Jumlah kemiskinan akan meningkat</li> <li>&gt; Bahaya kebakaran bila musim kemarau</li> <li>&gt; Bahaya banjir bila musim hujan tiba</li> </ul>
<p><b>Peluang (Opportunity)</b></p>	<p><b>Tantangan ( External )</b></p>



<p>&gt; Pada aspek pengembangan SDM pemindahan ibu Kota baru ini dapat memunculkan peluang maupun ancaman. Peluang akan datang dari bermigrasinya SDM yang berkualitas, ini akan memunculkan pionir – pionir pengembangan ekonomi maupun social yang baru. Hal ini mengharuskan Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya.</p> <p>&gt; Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>&gt; Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang.</p> <p>&gt; Kontribusi dari pihak perusahaan berupa bantuan dana dan fisik dalam menunjang pembangunan Kecamatan Batu sopang.</p> <p>&gt; Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga peningkatan profesionalisme , sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi mudah didapat.</p>	<p>&gt;Krisis Pandemi Covid-19 yang melanda, memunculkan ancaman bagi beberapa sektor usaha, menyebabkan naiknya angka pengangguran di Kecamatan Batu Sopang.</p> <p>&gt;Masyarakat batu Sopang yang majemuk, terdiri dari banyak suku, bahasa dan Agama.</p> <p>&gt;Pertumbuhan ekonomi bergantung batubara.</p> <p>&gt;Meningkatnya peran ekonomi perkebunan kelapa sawit.</p> <p>&gt;Kesejahteraan masyarakat masih rendah</p> <p>&gt;Pembangunan berwawasan lingkungan Daerah Rawan Banjir dan tanah longsor</p> <p>&gt; Mobilitas penduduk yang tinggi</p>
--	---

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada di dalam Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Kantor Kecamatan Batu Sopang.

Adapun isu-isu strategis pada Kecamatan Batu Sopang dalam mengatasi berbagai permasalahan dimasa kini dan ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah



2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Kecamatan dan Desa
3. Perlunya peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas penegakan PERDA di Kecamatan Batu Sopang
5. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
6. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
8. Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam ketertiban keamanan dan kenyamanan lingkungan
9. Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat yang meliputi urusan social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan masyarakat , serta pemberdayaan masyarakat Desa kepemudaan .
10. Perlunya peningkatan kualitas perlindungan social masyarakat kurang mampu.



## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Strategi Jangka Menengah Kantor Kecamatan Batu Sopang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Batu Sopang yang responsive dan tangkas
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Batu Sopang adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Batu Sopang dan Desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah Kecamatan Batu Sopang
3. Meningkatnya lingkungan daerah Kecamatan Batu Sopang yang Kondusif
4. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :



**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan pelayanan masyarakat	80	81	82	83	83
		Meningkatnya Lingkungan Dearah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	20	67	57	50	47
2	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	80	80	85	85	85

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Batu Sopang



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran kantor Kecamatan Batu Sopang strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel
3. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan system informasi pelayanan public
4. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penegakan Perda
6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pendidikan politik dan prilaku demokratis
8. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perlindungan social melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan seni budaya lokal, meningkatkan peran pemuda dan prestasi olah raga, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha.

### 5.2. Kebijakan

Adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Batu Sopang memiliki kebijakan yaitu :

1. Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
2. Peningkatan kualitas perencanaan yang akuntabel
3. Pengoptimalan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan system informasi pelayanan public
4. Penyusunan dan penetapan standar pelayanan Publik
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas penegakan Perda
6. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
7. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Pendidikan politik dan prilaku demokratis
8. Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan kinerja Kecamatan Batu Sopang
9. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan social melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni budaya lokal, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha.



Berikut tabel relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2021 -2026 yang berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Batu Sopang.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Kecamatan Batu Sopang berdasarkan RPJMD Kabupaten Paser**

<b>VISI</b>	<b>Menuju Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan (RPJMD Kabupaten Paser)</b>		
<b>MISI 2</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
		Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan yang akuntabel
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	Pengoptimalan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik
		Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik	Peyusunan dan Penerapan Standar pelayanan publik
	3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penegakan Perda	Peningkatan kuantitas dan kualitas penegakan Perda
		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang 6 politik dan perilaku demokratis
		Pencanangan gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa	Gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa
<b>MISI 4</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>		
Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Meningkatkan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan	Peningkatan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan di kecamatan
		Meningkatkan peran dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah kecamatan	Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa di wilayah kecamatan dalam kegiatan pembangunan



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Batu Sopang selama tahun 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Batu Sopang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Paser selama 5 tahun.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Sesuai dengan Pemutahiran Permendagri 90 Tahun 2019 , program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser periode 2021-2026 harus relevan dengan program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026.

Program Kecamatan Batu Sopang	
No.	Program Prioritas
1	Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
6	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa



Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam Renstra Kantor Kecamatan Batu Sopang tahun 2021-2026 ini, terdapat pula beberapa revisi kegiatan yang disebabkan karena adanya penggabungan dan atau pemidahan kegiatan, sehingga kegiatan yang semula berjumlah 41 menjadi 14 Kegiatan dengan 30 sub kegiatan.

## **6.2 Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Batu Sopang berdasarkan pada pedoman pengukuran kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Batu Sopang disusun dan dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

## **6.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Batu Sopang adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Batu Sopang, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.



#### **6.4. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batu Sopang bersumber pada dana APBD Kabupaten Paser. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Batu Sopang . Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Batu Sopang dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang sebagaimana tertuang dalam table 6.1 berikut :



TUJUAN	SASARAN	KODE	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Kondisi Awal 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas					Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		68,85	70	5.685.991.708	73	6.225.648.058	75	5.503.643.781	80	5.697.789.533	85	5.925.797.833	85	6.026.057.926		Batu Sopang
	1). Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah		Nilai SAKIP dari Inspektorat			Nilai	B	B	4.385.678.668	B	4.360.155.738	B	4.594.876.845	B	4.752.671.918	B	4.942.875.514	B	23.445.696	Kasubag Keuangan	Batu Sopang



		7.01.01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat</b>	Nilai	N/A	76	4.279.086.668	72	4.258.792.773	74	4.511.306.121	76	4.665.758.366	80	4.852.485.420	80	22.577.629.547	Kasubag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu</b>	persen	18	80	14.000.100	80	21.699.295	80	22.784.259	80	23.695.630	80	24.740.174	80	106.919.458	Kasubag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5	4.643.400,00	5	4.395.442	5	4.615.215	5	4.799.823	5	4.991.816	5	23.445.696	Kasubag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	5	000,00	5	2.441.700	5	2.563.785	5	2.666.336	5	2.772.990	5	10.444.811	Kasubag Keuangan	Batu Sopang



					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1		1		1		1		1			
		7.01.0 1.2.01 .03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	N/A	5	000,00	5	2.441.700	5	2.563.785	5	2.666.336	5	2.772.990	5	10.444.811	Kasubag Keuangan	Batu Sopang
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1		1		1		1		1			





		7.01.0 1.2.01 .04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	N/A	5	000,00	5	1.781 .700	5	1.870 .785	5	1.945 .616	5	2.023 .441	5	7.621. 542	Kasu bbag Keua ngan	Ba tu So pa ng
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1		1		1		1		1			
		7.01.0 1.2.01 .05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	N/A	5	000,00	5	1.781 .700	5	1.870 .785	5	1.945 .616	5	2.023 .441	5	7.621. 542	Kasu bbag Keua ngan	Ba tu So pa ng



					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1		1		1		1					
		7.01.0 1.2.01 .07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	9.356.700,00	4	8.857.052	4	9.299.905	4	9.671.901	4	10.155.496	4	47.341.054	Kasubag Keuangan	Batu Sopang
		<b>7.01.0 1.2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase temuan ditindak lanjuti	Persen	N/A	80	3.879.959.977	82	3.872.532.647	83	4.070.022.779	84	4.232.823.690	85	4.402.136.638	85	20.457.475.731		Batu Sopang
		7.01.0 1.2.02 .01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	22/14	3.740.871.397,00	23/14	3.740.871.397	25/14	3.927.914.967	25/14	4.085.031.566	26/14	4.248.432.828	26/14	19.743.122.155	Kasubag Keuangan	Batu Sopang
		7.01.0 1.2.02 .04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	Dokumen	N/A	100	136.388.580,00	100	129.105.430	120	135.560.701	125	140.983.129	130	146.622.455	135	688.660.295	Kasubag Keuangan	Batu Sopang



				Akuntansi SKPD																	
		7.01.0 1.2.02 .05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	N/A	2	2.700. 000,00	1	2.555 .820	1	2.683 .611	1	2.790 .955	1	2.902 .594	1	13.63 2.980	Kasu bbag Keua ngan	Ba tu So pa ng
		7.01.0 1.2.02 .07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Tri wulanan/sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Sem esteran	Lapor an	4	4	000,00	4	0	4	3.863 .500	4	4.018 .040	4	4.178 .762	4	12.06 0.302	Kasu bbag Keua ngan	Ba tu So pa ng



SKPD																					
		<b>7.01.0 1.2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai $\geq 75$	Persen	N/A	70	11.962.050	75	11.323.277	75	11.889.440	75	12.365.018	80	12.859.619	80	60.399.404	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.0 1.2.05 .03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	15	15	11.962.050,00	15	11.323.277	15	11.889.440	15	12.365.018	15	12.859.619	15	60.399.404	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		<b>7.01. 01.2. 06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	persen	N/A	100	107.284.830,00	100	101.555.820	100	117.343.821	100	122.037.574	100	126.919.077	100	585.341.322	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.0 1.2.06 .01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	N/A	3	1.937.200,00	3	1.833.754	3	1.925.441	3	2.002.459	3	2.082.557	3	9.781.411	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang



				Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan															m	
		7.01.0 1.2.06 .04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	25	28.213 .630,0 0	25	26.70 7.022	26	28.04 2.373	26	29.16 4.068	26	30.33 0.631	27	142.4 57.72 5	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.0 1.2.06 .05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	3	000,00	3	10.20 0.200	3	10.71 0.210	3	11.13 8.618	3	11.58 4.163	3	43.63 3.192	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.0 1.2.06 .09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	91	91	77.134 .000,0 0	95	73.01 5.044	10 0	76.66 5.797	10 0	79.73 2.428	10 0	82.92 1.726	10 0	389.4 68.99 5	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		<b>7.01.0 1.2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris dalam kondisi baik</b>	<b>persen</b>	<b>N/A</b>	<b>10 0</b>	<b>13.208 .800,0 0</b>	<b>10 0</b>	<b>12.50 3.450</b>	<b>10 0</b>	<b>38.12 8.623</b>	<b>10 0</b>	<b>13.65 3.767</b>	<b>10 0</b>	<b>14.19 9.918</b>	<b>10 0</b>	<b>91.69 4.558</b>	<b>Kasubag Kepegawaian &amp; Umum</b>	<b>Batu Sopang</b>



		7.01.0 1.2.07 .02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	N/A	0	000,00	1	0	1	25.00 0.000	1	0	1	0	1	25.00 0.000	Kasu bbag Kepe gawai & Umu m	Ba tu So pa ng
		7.01.0 1.2.07 .06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	7	3	13.208 .800,0 0	5	12.50 3.450	5	13.12 8.623	5	13.65 3.767	5	14.19 9.918	5	66.69 4.558	Kasu bbag Kepe gawai & Umu m	Ba tu So pa ng
		<b>7.01.0 1.2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat</b>	persen	N/A	80	210.99 1.393, 00	80	199.7 24.45 3	85	209.7 10.67 5	85	218.0 99.10 2	85	226.8 23.06 6	85	1.065. 348.6 89	Kasu bbag Kepe gawai & Umu m	Ba tu So pa ng
		7.01.0 1.2.08 .01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor an	N/A	10 8	1.080. 000,00	11 3	1.022 .328	11 9	1.073 .444	12 5	1.116 .382	13 1	1.161 .037	13 1	5.453. 192	Kasu bbag Kepe gawai & Umu m	Ba tu So pa ng
		7.01.0 1.2.08 .02		Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber	Lapor an	12	12	71.911 .393,0 0	12	68.07 1.325	12	71.47 4.891	12	74.33 3.886	12	77.30 7.242	12	363.0 98.73 7	Kasu bbag Kepe gawai & Umu m	Ba tu So pa ng



					Daya Air dan Listrik yang Disediakan																
		7.01.0 1.2.08 .04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	12	138.00 0.000,00	12	130.6 30.80 0	12	137.1 62.34 0	12	142.6 48.83 4	12	148.3 54.78 7	12	696.7 96.76 1	Kasubag Kepegawai an & Umum	Batu Sopang
		<b>7.01.0 1.2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris dalam kondisi baik</b>	persen	N/A	80	41.679 .518,0 0	80	39.45 3.832	85	41.42 6.523	85	43.08 3.584	85	44.80 6.928	85	210.4 50.38 5	Kasubag Kepegawai an & Umum	Batu Sopang
		7.01.0 1.2.09 .02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	6	6	21.900 .000,0 0	6	20.73 0.540	6	21.76 7.067	6	22.63 7.750	6	23.54 3.260	6	110.5 78.61 6	Kasubag Kepegawai an & Umum	Batu Sopang



		7.01.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	13	7.838.100,00	13	7.419.545	18	7.790.523	19	8.102.144	19	8.426.229	13	39.576.541	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		7.01.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit	2	2	11.941.418,00	3	11.303.746	3	11.868.934	3	12.343.691	3	12.837.439	3	60.295.227	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang
		<b>7.01.0 6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	persen	100	100	106.592.000,00	100	101.362.965	100	83.570.723	100	86.913.552	100	90.390.094	100	468.829.336	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		<b>7.01.0 6.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang terfasilitasi</b>	Desa	9	9	106.592.000,00	9	101.362.965	9	83.570.723	9	86.913.552	9	90.390.094	9	468.829.336	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.0 6.2.01 .01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	N/A	9	9.385.000,00	9	8.883.841	9	9.328.033	9	9.701.154	9	10.089.201	9	47.387.229	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Batu Sopang





					Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa															Desa	
		7.01.0 6.2.01 .02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	N/A	9	4.480.000,00	9	4.240.768	9	4.452.806	9	4.630.919	9	4.816.155	9	22.620.648	Kasi Pembinaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.0 6.2.01 .03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	9	9	54.530.000,00	9	51.618.098	9	54.199.003	9	56.366.963	9	58.621.642	9	275.335.705	Kasi Pembinaan Masyarakat Desa	Batu Sopang



		7.01.0 6.2.01 .15		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	N/A	2	3.345.000,00	2	7.666.377	2	8.049.696	2	8.371.684	2	8.706.551	2	36.139.308	Kasi Pembinaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.0 6.2.01 .06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	4	23.000.000,00	-	21.771.800	2	-	-	-	-	-	-	44.771.800,00	Kasi Pembinaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.0 6.2.01 .17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	9	3.182.000,00	9	3.012.081	9	3.162.685	9	3.289.193	9	3.420.760	9	16.066.720	Kasi Pembinaan Masyarakat Desa	Batu Sopang
		7.01.0 6.2.01 .09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Dokumen	N/A	9	8.670.000,00	9	4.170.000	9	4.378.500	9	4.553.640	9	4.735.786	9	26.507.926	Kasi Pembinaan Masyarakat Desa	Batu Sopang



		n Desa																			
	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat</b>			Nilai	N/A	80	975.97 0.840, 00	80	1.558 .469. 994	81	586.3 93.49 4	82	609.8 49.23 4	83	634.2 43.20 3	83	4.364. 926.7 64	Kasi Pemerintahan	Batu Sopang
		<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	persen	80	80	528.32 0.640	80	1.500 .108. 317	80	525.1 13.73 4	80	546.1 18.28 3	80	567.9 63.01 4	80	3.667. 623.9 89	Kasi Pemerintahan	Batu Sopang	
		<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang</b>	<b>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh</b>	persen	100	100	80.780 .700	100	76.46 7.011	100	80.29 0.361	100	83.50 1.976	100	86.84 2.055	100	407.8 82.10 2	Kasi Pemerintahan	Batu Sopang	



				<b>ada di Kecamatan</b>	<b>Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>																
		7.01.0 2.2.02 .02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	295	250	80.780.700,00	255	76.467.011	257	80.290.361	258	83.501.976	260	86.842.055	260	407.882.102	Kasi Pemerintahan	Batu Sopang
		<b>7.01.0 2.2.03</b>		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	persen	N/A	100	224.083.400	100	1.212.117.346	100	222.723.214	100	231.632.142	100	240.897.428	100	2.131.453.530	Kasubag Kepegawaian & Umum	Batu Sopang



		7.01.0 2.2.03 .01	Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Doku men	4	4	224.08 3.400, 00	4	212.1 17.34 6	4	222.7 23.21 4	4	231.6 32.14 2	4	240.8 97.42 8	4	1.131. 453.5 31	Kasu bag Kepe gawai an & Umu m	Ba tu So pa ng
		7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Dilimpahka n kepada Camat	<b>Presentase Penyelengg araan Urusan Pemerintah an yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahka n kepada camat</b>	persen	100	10 0	223.45 6.540	10 0	211.5 23.96 1	10 0	222.1 00.15 9	10 0	230.9 84.16 5	10 0	240.2 23.53 2	10 0	1.128. 288.3 56	Kasi Kesm as	Ba tu So pa ng



		7.01.0 2.2.04 .03		Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewengana n Lain yang Dilimpahka n	Lapor an	N/A	4	223.45 6.540, 00	4	211.5 23.96 1	4	222.1 00.15 9	4	230.9 84.16 5	4	240.2 23.53 2	4	1.128. 288.3 56	Kasi Kesm as	Ba tu So pa ng
	<b>Mening katnya lingkun gan daerah yang kondus if</b>		<b>Angka Krimin alitas</b>			Kejadi an	N/A	20	324.34 2.200, 00	67	307.0 22.32 7	57	322.3 73.44 3	50	335.2 68.38 1	47	348.6 79.11 6	47	1.637. 685.4 66		Ba tu So pa ng
		<b>7.01.0 4</b>		<b>PROGRAM KOORDIN ASI KETENR AMAN DAN KETERTIB AN UMUM</b>	<b>Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban</b>	persen	N/A	65	324.34 2.200, 00	55	307.0 22.32 7	60	322.3 73.44 3	65	335.2 68.38 1	70	348.6 79.11 6	70	1.637. 685.4 66	Kasi Tranti bum	Ba tu So pa ng
		<b>7.01.0 4.2.01</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyeleng garan Ketentram an dan Ketertiban Umum</b>	<b>Presentasi Koordinasi Upaya Penyeleng garan Ketentram an dan Ketertiban Umum</b>	persen	100	10 0	304.06 6.950, 00	10 0	287.8 29.77 5	10 0	302.2 21.26 4	10 0	314.3 10.11 4	10 0	326.8 82.51 9	10 0	1.535. 310.6 21	Kasi Tranti bum	Ba tu So pa ng



		7.01.0 4.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	12	301.30 4.700, 00	12	285.2 15.02 9	12	299.4 75.78 0	12	311.4 54.81 2	12	323.9 13.00 4	12	1.521. 363.3 25	Kasi Tranti bum	Ba tu So pa ng
		7.01.0 4.2.01 .02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	N/A	1	2.762. 250,00	3	2.614 .746	4	2.745 .483	5	2.855 .302	9	2.969 .515	9	13.94 7.296	Kasi Kesm as	Ba tu So pa ng
		<b>7.01.0 4.2.04</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Presentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>10 0</b>	<b>20.275 .250,0 0</b>	<b>10 0</b>	<b>19.19 2.552</b>	<b>10 0</b>	<b>20.15 2.179</b>	<b>10 0</b>	<b>20.95 8.266</b>	<b>10 0</b>	<b>21.79 6.597</b>	<b>10 0</b>	<b>102.3 74.84 4</b>	<b>Kasi Tranti bum</b>	<b>Ba tu So pa ng</b>



						Daerah															
		7.01.0 4.2.04 .01		Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lapor an	12	12	20.275 .250,0 0	12	19.19 2.552	12	20.15 2.179	12	20.95 8.266	12	21.79 6.597	12	102.3 74.84 4	Kasi Tranti bum	Ba tu So pa ng
		<b>7.01.0 5</b>		<b>PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM</b>	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ter selesaikan di wilayah kecamatan	persen	100	10 0	61.654 .000	10 0	58.36 1.676	10 0	61.27 9.760	10 0	63.73 0.951	10 0	66.28 0.189	10 0	311.3 06.57 6		Ba tu So pa ng







				Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
		7.01.0 5.2.01 .04		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	N/A	55	3.435.000,00	60	3.251.571	65	3.414.150	65	3.550.716	65	3.692.744	65	17.344.180	Kasi Trantibum	Batu Sopang	



				Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kantor Camat Batu Sopang)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	9	9	50.875.000,00	9	48.158.275	9	50.566.189	9	52.588.836	9	54.692.390	9	256.880.690	Kasi Kesmas	Batu Sopang
<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</b>					<b>Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan</b>		N/A	100	91.785.750,00	100	86.884.391	100	91.228.610	100	94.877.755	100	98.672.865	100	463.449.371		Batu Sopang





		7.01.0 3.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lemba ga Kemas yaraka tan	N/A	6	39.649 .750,0 0	6	37.53 2.453	6	39.40 9.076	6	40.98 5.439	6	42.62 4.857	6	200.2 01.57 5	Kasi Pemb erday aan Masy arakat Desa	Ba tu So pa ng
		7.01.0 3.2.01 .03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lapor an	N/A	3	52.136 .000,0 0	3	49.35 1.938	3	51.81 9.534	3	53.89 2.316	3	56.04 8.008	3	263.2 47.79 6	Kasi Pemb erday aan Masy arakat Desa	Ba tu So pa ng



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Batu Sopang diharapkan dapat mendukung :

1. Misi ke II (dua) RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 yakni Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan tangkas.
2. Misi ke IV (Empat) RPJMD Kabupaten Paser 2021 – 2016 yakni Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Sehingga sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Batu Sopang dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Batu Sopang
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Batu sopang
3. Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif di Kecamatan Batu Sopang
4. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan se Kecamatan Batu Sopang

Penentuan indikator kinerja Kantor Kecamatan Batu Sopang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dan berkaitan serta relevan dengan program-program RPJMD. Implementasi dari tugas dan fungsi

Kantor Kecamatan Batu Sopang merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026. Tolak ukur hasil kinerja yang digunakan menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas untuk memberikan masukan terhadap pencapaian sasaran Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah. Indikator penilaian Kantor Kecamatan Batu Sopang mengacu pada indikator kinerja utama yang menjadi elemen kontrol terhadap hasil pencapaian kinerja dalam rentang waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :



**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP dari Inspektorat	B	B	B	B	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan pelayanan masyarakat	N/A	80	80	81	82	83	83
3	Angka Kriminalitas	N/A	20	67	57	50	47	47
4	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	N/A	80	80	85	85	85	85



## **BAB VIII.**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan ini berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relative cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel, atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga upaya yang ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan Pemerintahan Umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 2021- 2026.